



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**KPKNL**  
JAKARTA V

# LAPORAN KINEJA KPKNL JAKARTA V

2022





## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja.

Berpedoman dengan peraturan tersebut maka KPKNL Jakarta V telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Laporan capaian kinerja tahun 2022 KPKNL Jakarta V menyajikan hasil pencapaian terhadap 11 (sebelas) sasaran strategis *Kemenkeu Three* KPKNL dengan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama, yang berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2022 sebesar 114,45% beserta hasil analisa atas capaian tersebut.

Dalam laporan ini juga disajikan beberapa capaian/penghargaan yang berhasil diperoleh oleh KPKNL Jakarta V selama Tahun 2022 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta V, baik dari Kementerian Keuangan, lembaga sertifikasi eksternal, maupun dari Kementerian/Lembaga lain.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022 ini disusun dengan harapan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan, sekaligus merupakan pertanggungjawaban atas upaya pencapaian tujuan/sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada KPKNL Jakarta V.

Jakarta , 02 Januari 2023

Kepala Kantor



Adriana Viveriyanti

## DAFTAR ISI

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pengantar</b>                                                     | <b>i</b>   |
| <b>Daftar Isi</b>                                                    | <b>ii</b>  |
| <b>Ringkasan Eksekutif</b>                                           | <b>iii</b> |
| <br>                                                                 |            |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                                        |            |
| A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi                            | 1          |
| B. Peran Strategi KPKNL Jakarta V                                    | 6          |
| C. Sistematika Laporan                                               | 9          |
| <br>                                                                 |            |
| <b>BAB II      RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA</b>           |            |
| A. Rencana Strategis                                                 | 10         |
| B. Penetapan Kinerja                                                 | 11         |
| <br>                                                                 |            |
| <b>BAB III      AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN</b> |            |
| A. Capaian Kinerja Organisasi                                        | 15         |
| B. Realisasi Anggaran                                                | 28         |
| <br>                                                                 |            |
| <b>BAB IV      CAPAIAN LAIN</b>                                      | <b>31</b>  |
| <b>BAB V      PENUTUP</b>                                            | <b>32</b>  |



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Pertanggungjawaban KPKNL Jakarta V dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan disampaikan kepada pemangku kepentingan melalui Laporan Kinerja Tahun 2022 yang memuat pencapaian sasaran/tujuan strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian Visi DJKN yaitu “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara dan Lelang, KPKNL Jakarta V menyelenggarakan fungsi :

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan . negara, penilaian, dan lelang;



- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam perencanaan kegiatan, Kementerian Keuangan telah menetapkan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) untuk melengkapi Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta V Tahun 2022 terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan Slogan Berupa Lima “Lugas,Ikhlas, Melayani Anda” , seluruh pegawai KPKNL Jakarta V bertekad untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dengan penuh Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan sesuai Nilai - Nilai Kementerian Keuangan.



## B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan *Balanced Scorecard* (BSC), rata-rata tingkat pencapaian kinerja terhadap 19 (sembilan belas) IKU yang merupakan penjabaran dari 11 (sebelas) sasaran strategis Kemenkeu Three KPKNL Jakarta V tahun 2022 adalah sebesar 114,45% dengan rincian sebagai berikut :

| NO.                                       | IKU                                                                                | TARGET | REALISASI | INDEKS<br>(MAKS 120%) |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|
| <b>Stakeholder Perspective (25%)</b>      |                                                                                    |        |           | <b>30%</b>            |
| <b>1</b>                                  | <b>Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian</b>     |        |           | 120%                  |
|                                           | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100%   | 129,94%   | 120%                  |
|                                           | Persentase produktivitas lelang                                                    | 30%    | 44,94%    | 120%                  |
| <b>Customer Perspective (15%)</b>         |                                                                                    |        |           | <b>16,24%</b>         |
| <b>2</b>                                  | <b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>             |        |           | 116,27%               |
|                                           | Persentase Realisasi Pokok Lelang                                                  | 100%   | 112,53%   | 112,53%               |
|                                           | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara                                    | 100%   | 135,41%   | 120%                  |
| <b>3</b>                                  | <b>Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi</b>                                       |        |           | 100,21%               |
|                                           | Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL                                             | 4,75   | 4,76      | 100,21%               |
| <b>Internal Process Perspective (15%)</b> |                                                                                    |        |           | <b>33,79%</b>         |
| <b>4</b>                                  | <b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b>                         |        |           | 115,38%               |
|                                           | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK                                      | 65%    | 80,49%    | 120%                  |
|                                           | Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi                                     | 100%   | 117,48%   | 117,48%               |
|                                           | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)                         | 100%   | 123%      | 120%                  |
|                                           | Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)                     | 100%   | 100%      | 100,00%               |
| <b>5</b>                                  | <b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>                        |        |           | 120,00%               |
|                                           | Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian                                                | 19%    | 7,30%     | 120,00%               |
| <b>6</b>                                  | <b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>                |        |           | 114,35%               |
|                                           | Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction                 | 92%    | 100,00%   | 108,70%               |
|                                           | Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN                                                  | 10%    | 0,2%      | 120,00%               |
| <b>7</b>                                  | <b>Edukasi yang Efektif</b>                                                        |        |           | 102,68%               |



|                                                |                                                                              |       |        |                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|
|                                                | Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi                                   | 93    | 93,44  | 102,68%        |
| <b>8</b>                                       | <b>Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif</b>                              |       |        | <b>110,79%</b> |
|                                                | Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara | 85%   | 94,17% | 110,79%        |
| <b>Learning &amp; Growth Perspective (30%)</b> |                                                                              |       |        | <b>34,42%</b>  |
| <b>9</b>                                       | <b>SDM yang kompeten</b>                                                     |       |        | <b>120,00%</b> |
|                                                | Persentase pengembangan kompetensi pegawai                                   | 100%  | 120%   | 120,00%        |
| <b>10</b>                                      | <b>Organisasi yang fit for purpose</b>                                       |       |        | <b>115,42%</b> |
|                                                | Nilai review pengelolaan kinerja                                             | 80    | 98,63  | 120%           |
|                                                | Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator                     | 90    | 99,26  | 110,29%        |
| <b>11</b>                                      | <b>Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal</b>                   |       |        | <b>114,04%</b> |
|                                                | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                                     | 95,5% | 95,92% | 100,44%        |
|                                                | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan                            | 85%   | 100%   | 117,65%        |
| <b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>          |                                                                              |       |        | <b>114,45%</b> |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang telah diubah dengan PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang diubah kembali berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021.

Berdasarkan Pasal 30 PMK Nomor 154/PMK.01/2021, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, KPKNL menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan . negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL dipimpin oleh Kepala kantor yang merupakan pejabat eselon 3, dan terdiri dari 5 (lima) seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;



- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Tahun 2022 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta V dilaksanakan oleh 44 (empat puluh empat) orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1

## SDM Berdasarkan Golongan

| No.          | Golongan | Laki – Laki | Perempuan | Total Orang |
|--------------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 1.           | I        | 0           | 0         | 0           |
| 2.           | II       | 8           | 2         | 10          |
| 3.           | III      | 21          | 7         | 28          |
| 4.           | IV       | 5           | 1         | 6           |
| <b>TOTAL</b> |          | <b>34</b>   | <b>10</b> | <b>44</b>   |

Tabel 2

## SDM Berdasarkan Usia

| Kelompok Umur | Golongan Ruang |           |           |          | Jumlah    |
|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|
|               | I              | II        | III       | IV       |           |
| 18 – 30       | -              | 8         | -         | -        | 8         |
| 31 – 40       | -              | 2         | 14        | -        | 16        |
| 41 – 50       | -              | -         | 12        | 5        | 17        |
| Di atas 50    | -              | -         | 2         | 1        | 3         |
| <b>Total</b>  | <b>-</b>       | <b>10</b> | <b>28</b> | <b>6</b> | <b>44</b> |

Tabel 3

## SDM Berdasarkan Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Golongan |    |     |    | Total Pegawai |
|-----|--------------------|----------|----|-----|----|---------------|
|     |                    | I        | II | III | IV |               |
| 1.  | SD                 | -        | -  | -   | -  | -             |
| 2.  | SLTP               | -        | -  | -   | -  | -             |



|              |                      |   |    |    |   |    |
|--------------|----------------------|---|----|----|---|----|
| 3.           | SLTA/DI/DII          | - | -  | 2  | - | 2  |
| 4.           | DI                   | - | 2  | 1  | - | 3  |
| 5.           | DIII                 | - | 8  | 2  | - | 10 |
| 6.           | DIV/Sarjana          | - | -  | 21 | - | 21 |
| 7.           | Pasca Sarjana/Master | - | -  | 2  | 6 | 8  |
| 8.           | Doktor/S3            | - | -  | -  | - | -  |
| <b>TOTAL</b> |                      | - | 10 | 28 | 6 | 44 |

**Tabel 4**  
**SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional**

| No.          | Jabatan Fungsional              | Jumlah Orang |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| 1.           | Pelelang Ahli Madya             | 1            |
| 2.           | Pelelang Ahli Muda              | 4            |
| 3.           | Pelelang Ahli Pertama           | 2            |
| 4.           | Penilai Pemerintah Ahli Muda    | 2            |
| 5.           | Penilai Pemerintah Ahli Pertama | 2            |
| 6.           | Penata Lakasana Barang Terampil | 1            |
| 7.           | Pranata Keuangan APBN Terampil  | 1            |
| <b>TOTAL</b> |                                 | <b>13</b>    |



Berdasarkan PMK 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN tanggal 28 Oktober 2021 terjadi Perubahan terminologi fungsi utama pada DJKN dari pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang menjadi pengelolaan kekayaan negara, penilaian dan lelang. Terjadi penataan ulang kembali unit organisasi berdasarkan fungsi utama baru DJKN sesuai dengan amanat Perpres 57/2020. Terjadi Perubahan Struktur Organisasi pada KPKNL terkait Penerapan PMK 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN sebagaimana di jelaskan pada bagan berikut :



Untuk Kelompok Jabatan Fungsional dijeaskan pada Tabel Dibawah Ini :

**Tabel 5**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

| No. | Nama                     | Jabatan Fungsional           |
|-----|--------------------------|------------------------------|
| 1.  | Akhmad abrori            | Pelelang Ahli Madya          |
| 2.  | Wahyu hidayat            | Pelelang Ahli Muda           |
| 3.  | Nomie arumsari           | Pelelang Ahli Muda           |
| 4.  | Suhandi                  | Pelelang Ahli Muda           |
| 5.  | Arief ar rosyiid         | Pelelang Ahli Muda           |
| 6.  | Ilman Kurniawan Syaray   | Pelelang Ahli Pertama        |
| 7.  | Aga budiman              | Pelelang Ahli Pertama        |
| 8.  | Hendra jan sadarmo purba | Penilai Pemerintah Ahli Muda |
| 9.  | Husnaeni                 | Penilai Pemerintah Ahli Muda |



|     |                          |                                 |
|-----|--------------------------|---------------------------------|
| 10. | Rahmat adi nugroho       | Penilai Pemeritah Ahli Pertama  |
| 11. | Imam sartono hadi wijaya | Penilai Pemeritah Ahli Pertama  |
| 12. | Teddy indramawan         | Penata Lakasana Barang Terampil |
| 13. | Abdul rajab nasution     | Pranata Keuangan APBN Terampil  |



## B. PERAN STRATEGIS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V

Sebagai organisasi yang memiliki tugas memberikan pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang, KPKNL Jakarta V memiliki peran strategis sebagai berikut :

### a. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Jakarta V turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara yang difokuskan pada upaya pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu, KPKNL Jakarta V selaku *asset manager* mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam rangka peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

### b. Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara. Proses penilaian dilakukan setelah adanya analisis oleh pengelola barang yang bertujuan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dan nilai sewa wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara.

Di sisi lain, penilaian dalam rangka memperoleh nilai pasar dan nilai likuidasi dilakukan terhadap objek penilaian yang merupakan barang jaminan/harta kekayaan lain milik debitur, dalam proses pengurusan piutang negara oleh KPKNL Jakarta V selaku PUPN.

Hasil penilaian barang milik negara tersebut akan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara, dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.



### c. **Pengurusan Piutang Negara**

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan – badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang telah diserahkan dan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah.

Selain itu, juga terdapat penyerahan piutang negara dari sejumlah Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang permasalahannya sangat kompleks. Namun sejalan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, dinyatakan bahwa Piutang BUMN bukan sebagai Piutang Negara, maka KPKNL Jakarta V sejak tanggal tersebut tidak melakukan pengurusan atas Piutang BUMN.

Dengan terbentuknya Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih BLBI (Satgas BLBI) Dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti, Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia jo. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2021



tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

**d. Pelayanan Lelang**

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu peraturan/putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien, dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Jakarta V diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam "*mindset*" masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

**e. Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi**

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, rencana kerja, rencana strategik, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Seksi Hukum dan Informasi bertugas melakukan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (*legal opinion*) serta perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, menyusun Laporan kuntabilitas Kinerja (LAKIN), menatausahakan hasil pengurusan piutang negara dan lelang. Selain itu, terdapat tugas berupa pengawasan terhadap implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan kehumasan.



### **C. SISTEMATIKA LAPORAN**

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

BAB I     Pendahuluan

BAB II    Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

BAB III   Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

BAB IV   Capaian Lain

BAB V     Penutup

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dimaksud, selama tahun 2022 KPKNL Jakarta V telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II Laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja KPKNL Jakarta V di tahun yang akan datang.



## BAB II

### RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis.

Dalam mengemban tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Jakarta V mempunyai visi "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Untuk merealisasikan visi tersebut, KPKNL Jakarta V mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Jakarta V sebagaimana ditetapkan dalam Renstra KPKNL Jakarta V Tahun 2020-2024 adalah "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

Pada dasarnya sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik, dalam jangka pendek dan terukur. Adapun sasaran yang hendak dicapai KPKNL Jakarta V untuk Tahun Anggaran 2022 meliputi :

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian;



2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi;
4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
7. Edukasi yang Efektif;
8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif;
9. SDM yang Kompeten;
10. Organisasi yang Fit For Purpose;
11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal;

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Jakarta V melaksanakan program “Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang (wilayah kerja KPKNL)”. Program tersebut merupakan program yang ditetapkan dalam Renstra KPKNL Jakarta V Tahun 2020 - 2024.

## B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dalam hal ini KPKNL Jakarta V.

KPKNL Jakarta V memiliki beban tugas tersendiri yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 9/KN/2017 tentang Pembagian Tugas Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai pedoman yang wajib untuk diikuti dan dilaksanakan.

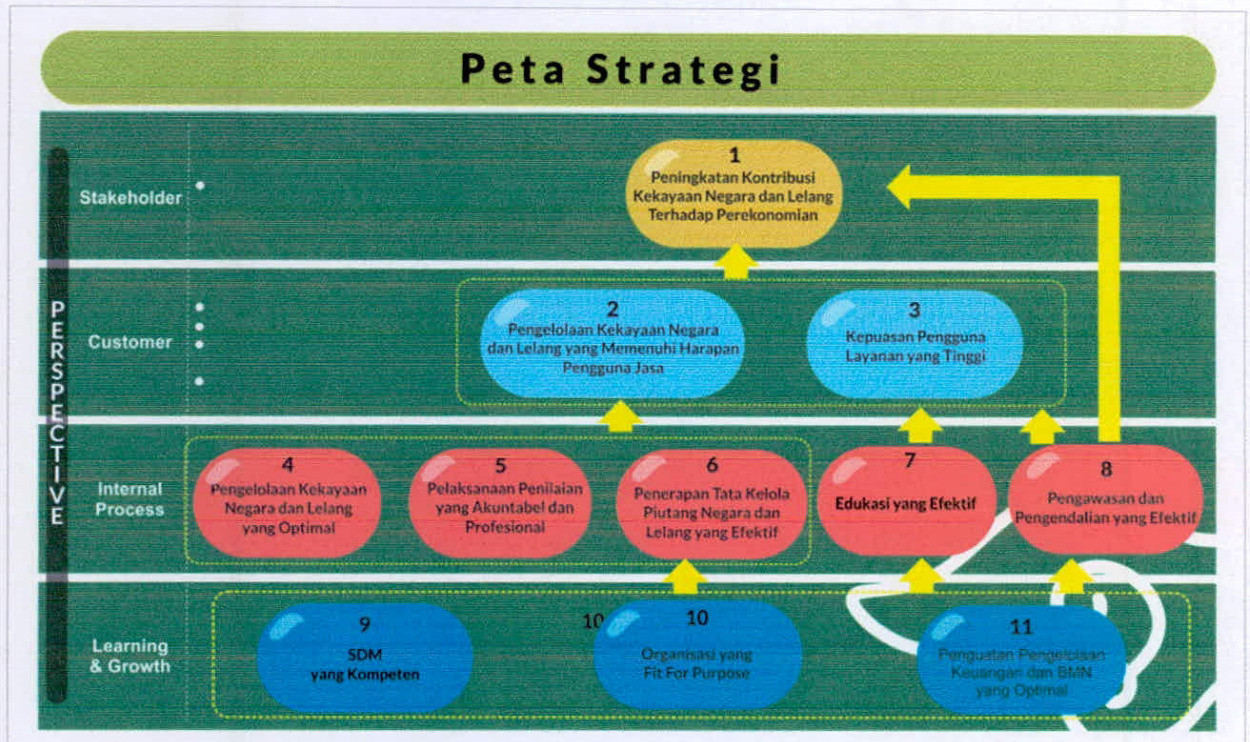
Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Jakarta V harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. *Balance Score Card* (BSC) merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Dalam hal ini, peta strategi Kemenkeu Three KPKNL Jakarta V tahun 2022 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth*



*Perspective.* Keempat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 10 Sasaran Strategis (SS) dengan peta strategis sebagai berikut:

### Visi KPKNL Jakarta V

**Mengelola Kekayaan Negara Secara Profesional dan Akuntabel Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan KPKNL**



Dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, KPKNL Jakarta V telah membuat suatu penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kerja yang akan dicapai pada satu waktu tertentu. Penetapan Kinerja KPKNL Jakarta V tahun 2022 sesuai dengan peta strategis Kemenkeu Three Tahun 2022 terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:



**Tabel 6**  
**Penetapan Kinerja Berdasarkan Peta Strategis Tahun 2022**

| NO.                                 | IKU                                                                                | TARGET |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Stakeholder Perspective</b>      |                                                                                    |        |
| <b>1</b>                            | <b>Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian</b>     |        |
|                                     | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100%   |
|                                     | Persentase produktivitas lelang                                                    | 30%    |
| <b>Customer Perspective</b>         |                                                                                    |        |
| <b>2</b>                            | <b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa</b>              |        |
|                                     | Persentase Realisasi Pokok Lelang                                                  | 100%   |
|                                     | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara                                    | 100%   |
| <b>3</b>                            | <b>Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi</b>                                       |        |
|                                     | Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL                                             | 4,75   |
| <b>Internal Process Perspective</b> |                                                                                    |        |
| <b>4</b>                            | <b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b>                         |        |
|                                     | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK                                      | 65%    |
|                                     | Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi                                     | 100%   |
|                                     | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)                         | 100%   |
|                                     | Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)                     | 100%   |
| <b>5</b>                            | <b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>                        |        |
|                                     | Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian                                                | 19%    |
| <b>6</b>                            | <b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>                |        |
|                                     | Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction                 | 92%    |
|                                     | Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN                                                 | 10%    |
| <b>7</b>                            | <b>Edukasi yang Efektif</b>                                                        |        |
|                                     | Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi                                         | 93     |



|                                          |                                                                              |       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>8</b>                                 | <b>Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif</b>                              |       |
|                                          | Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara | 85%   |
| <b>Learning &amp; Growth Perspective</b> |                                                                              |       |
| <b>9</b>                                 | <b>SDM yang kompeten</b>                                                     |       |
|                                          | Persentase pengembangan kompetensi pegawai                                   | 100%  |
| <b>10</b>                                | <b>Organisasi yang fit for purpose</b>                                       |       |
|                                          | Nilai review pengelolaan kinerja                                             | 80    |
|                                          | Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator                     | 90    |
| <b>11</b>                                | <b>Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal</b>                   |       |
|                                          | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                                     | 95,5% |
|                                          | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan                            | 85%   |

Berdasarkan tabel diatas maka untuk selanjutnya pembahasan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan dalam Bab III mengacu pada Capaian IKU, Evaluasi dan Analisis Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan.



## BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2022 terhadap 19 (Sembilan belas) IKU KPKNL Jakarta V Tahun 2022, dengan hasil 19 (sembilan belas) IKU memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja  $\geq 100\%$  (indikator warna hijau);

Adapun rincian tabel terhadap capaian kinerja atas 19 (Sembilan belas) IKU dimaksud adalah sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Capaian Kinerja Tahun 2021**

| NO.                                       | IKU                                                                                | TARGET | REALISASI | INDEKS<br>(MAKS 120%) |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|
| <b>Stakeholder Perspective (25%)</b>      |                                                                                    |        |           | <b>30%</b>            |
| <b>1</b>                                  | <b>Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian</b>     |        |           | 120%                  |
|                                           | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100%   | 129,94%   | 120%                  |
|                                           | Persentase produktivitas lelang                                                    | 30%    | 44,94%    | 120%                  |
| <b>Customer Perspective (15%)</b>         |                                                                                    |        |           | <b>16,24%</b>         |
| <b>2</b>                                  | <b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa</b>              |        |           | 116,27%               |
|                                           | Persentase Realisasi Pokok Lelang                                                  | 100%   | 112,53%   | 112,53%               |
|                                           | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara                                    | 100%   | 135,41%   | 120%                  |
| <b>3</b>                                  | <b>Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi</b>                                       |        |           | 100,21%               |
|                                           | Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL                                             | 4,75   | 4,76      | 100,21%               |
| <b>Internal Process Perspective (15%)</b> |                                                                                    |        |           | <b>33,79%</b>         |
| <b>4</b>                                  | <b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b>                         |        |           | 115,38%               |
|                                           | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK                                      | 65%    | 80,49%    | 120%                  |
|                                           | Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi                                     | 100%   | 117,48%   | 117,48%               |
|                                           | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)                         | 100%   | 123%      | 120%                  |



|                                                |                                                                              |       |         |                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|
|                                                | Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)               | 100%  | 100%    | 100,00%        |
| <b>5</b>                                       | <b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>                  |       |         | 120,00%        |
|                                                | Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian                                          | 19%   | 7,30%   | 120,00%        |
| <b>6</b>                                       | <b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>          |       |         | 114,35%        |
|                                                | Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction           | 92%   | 100,00% | 108,70%        |
|                                                | Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN                                            | 10%   | 0,2%    | 120,00%        |
| <b>7</b>                                       | <b>Edukasi yang Efektif</b>                                                  |       |         | 102,68%        |
|                                                | Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi                                   | 93    | 93,44   | 102,68%        |
| <b>8</b>                                       | <b>Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif</b>                              |       |         | 110,79%        |
|                                                | Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara | 85%   | 94,17%  | 110,79%        |
| <b>Learning &amp; Growth Perspective (30%)</b> |                                                                              |       |         | <b>34,42%</b>  |
| <b>9</b>                                       | <b>SDM yang kompeten</b>                                                     |       |         | 120,00%        |
|                                                | Persentase pengembangan kompetensi pegawai                                   | 100%  | 120%    | 120,00%        |
| <b>10</b>                                      | <b>Organisasi yang fit for purpose</b>                                       |       |         | 115,42%        |
|                                                | Nilai review pengelolaan kinerja                                             | 80    | 98,63   | 120%           |
|                                                | Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator                     | 90    | 99,26   | 110,29%        |
| <b>11</b>                                      | <b>Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal</b>                   |       |         | 114,04%        |
|                                                | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                                     | 95,5% | 95,92%  | 100,44%        |
|                                                | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan                            | 85%   | 100%    | 117,65%        |
| <b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>          |                                                                              |       |         | <b>114,45%</b> |

Pada tahun 2021, KPKNL Jakarta V memiliki 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan hasil sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) IKU memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja  $\geq$  100% (indikator warna hijau);
2. 1 (satu) IKU memperoleh hasil capaian kurang  $<100\%$  s.d.80% (indikator warna kuning);  
dijabarkan pada tabel berikut :



**Tabel 8**  
**Capaian Kinerja Tahun 2021**

| NO.                                       | IKU                                                                     | TARGET | REALISASI | INDEKS<br>(MAKS 120%) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|
| <b>Stakeholder Perspective (25%)</b>      |                                                                         |        |           | <b>28,44%</b>         |
| <b>1</b>                                  | <b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b>              |        |           | 112,89%               |
|                                           | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK                           | 62%    | 73,16%    | 118,00%               |
|                                           | Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)      | 100%   | 138,26%   | 120,00%               |
|                                           | Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara                   | 100%   | 101,79%   | 101,79%               |
| <b>Customer Perspective (15%)</b>         |                                                                         |        |           | <b>16,19%</b>         |
| <b>2</b>                                  | <b>Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien</b>    |        |           | 115,61%               |
|                                           | Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang               | 88,5   | 97,37     | 110,02%               |
|                                           | Persentase Realisasi Pokok Lelang                                       | 100%   | 140,43%   | 120,00%               |
| <b>3</b>                                  | <b>Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien</b>    |        |           | 100,21%               |
|                                           | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL                                  | 4,75   | 4,76      | 100,21%               |
| <b>Internal Process Perspective (15%)</b> |                                                                         |        |           | <b>31,60%</b>         |
| <b>4</b>                                  | <b>Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif</b> |        |           | 104,09%               |
|                                           | Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi                          | 100%   | 91,89%    | 91,89%                |
|                                           | Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)          | 100%   | 104,93%   | 104,93%               |
|                                           | Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian                                     | 22%    | 0,41%     | 120,00%               |
| <b>5</b>                                  | <b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>     |        |           | 109,53%               |
|                                           | Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN                                | 100%   | 101,91%   | 101,91%               |
|                                           | Persentase Produktivitas Lelang                                         | 35%    | 37,63%    | 107,51%               |
|                                           | Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction      | 92%    | 100,00%   | 108,70%               |
|                                           | Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN                                       | 12,5%  | 0,07%     | 120,00%               |
| <b>6</b>                                  | <b>Edukasi yang Efektif</b>                                             |        |           | 100,93%               |
|                                           | Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi                              | 91     | 91,84     | 100,93%               |



|                                                |                                                                  |       |         |                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|
| 7                                              | <b>Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif</b>                  |       |         | 106,80%        |
|                                                | Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara | 85%   | 90,78%  | 106,80%        |
| <b>Learning &amp; Growth Perspective (30%)</b> |                                                                  |       |         | <b>34,05%</b>  |
| 8                                              | <b>SDM yang Kompeten</b>                                         |       |         | 120,00%        |
|                                                | Persentase pengembangan kompetensi pegawai                       | 100%  | 120,00% | 120,00%        |
| 9                                              | <b>Organisasi yang Fit For Purpose</b>                           |       |         | 120,00%        |
|                                                | Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja                                  | 75    | 95,09   | 120,00%        |
|                                                | Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator         | 80    | 97,90   | 120,00%        |
| 10                                             | <b>Pengelolaan Keuangan yang Optimal</b>                         |       |         | 100,51%        |
|                                                | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                         | 95,5% | 95,99%  | 100,51%        |
| <b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>          |                                                                  |       |         | <b>110,28%</b> |

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maka terjadi Peningkatan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun 2022. Dalam hal ini, jika pada tahun 2021 NKO tercapai sebesar 110,28 % maka pada tahun 2022 NKO mencapai 114,45%.

#### a. Analisis Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 11 (sebelas) Sasaran Strategis Kemenkeu Three Jakarta V Tahun 2022 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* sebagai berikut:

##### 1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

- 1) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar capaian terhadap Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebesar 129,94% dari Target 100,00% sehingga mencapai Nilai Indeks 120,00%



## 2) Persentase produktivitas lelang

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna. pada tahun 2022 capaian terhadap Persentase produktivitas lelang terealisasi sebesar 40,94% dari target sebesar 30,00% sehingga mencapai Nilai Indeks 120,00%.

## 2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa

### 1) Persentase Realisasi Pokok Lelang

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu. Pada tahun 2022 capaian terhadap Persentase Realisasi Pokok Lelang terealisasi sebesar 112,53% dari target sebesar 100,00% dengan nilai indeks sebesar 112,53%.

### 2) Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:

1. Angsuran
2. Pelunasan
3. Penarikan/ Pengembalian



4. Pelunasan

5. PSBDT

6. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2021.

Pada tahun 2022 capaian Persentase realisasi pokok lelang terealisasi sebesar 135,41% dari target 100% dengan nilai indeks sebesar 120,00%.

### **3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi**

Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (quick win). Survei dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan. Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2022 adalah sebesar 4,76 dari target sebesar 4,75 dengan nilai indeks sebesar 100,21%.

### **4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal**

#### **1) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK**

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar.

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020. Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2022 adalah sebesar 80,49% dari target sebesar 65% dengan nilai indeks sebesar 120,00%.

#### **2) Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi**

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak. Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2022 adalah sebesar 117,48% dari target sebesar 100% dengan nilai indeks sebesar 117,48%.

#### **3) Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)**



IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas
2. BKPN Penarikan
3. BKPN dikembalikan, dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)

Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2022 adalah sebesar 123,00% dari target sebesar 100% dengan nilai indeks sebesar 120,00%.

4) Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

"Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).", Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2022 adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100% dengan nilai indeks sebesar 100,00%.

## 5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

1) Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

"Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%.



Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.", Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2022 adalah sebesar 7,30% dari target sebesar 19% dengan nilai indeks sebesar 120,00%.

#### **6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif**

##### **1) Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction**

"E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi:

1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.

2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account)". Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2022 adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 92 dengan nilai indeks sebesar 108,70%.

##### **2) Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN**

"PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:

-Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi



-Selisih antara pembukuan PNB MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang\* dengan PNB pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2022 adalah sebesar 0,2% dari target sebesar 10,00% dengan nilai indeks sebesar 120,00%.

## **7. Edukasi yang Efektif**

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali). Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2022 adalah sebesar 93,44% dari target sebesar 93% dengan nilai indeks sebesar 102,68%.

## **8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif**

Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara

"Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pengawasan dan pengendalian BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:". Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2022 adalah sebesar 94,17% dari target sebesar 85% dengan nilai indeks sebesar 110,79%.



## 9. SDM yang kompeten

Persentase pengembangan kompetensi pegawai

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. "Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit, Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat." Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2022 adalah sebesar 120,00% dari target sebesar 100,00% dengan nilai indeks sebesar 120,00%.

## 10. Organisasi yang *fit for purpose*

### 1) Nilai review pengelolaan kinerja

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2022 adalah sebesar 98,63 dari target sebesar 80 dengan nilai indeks sebesar 120,00%.

### 2) Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

"Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.". Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2022 adalah sebesar 99,26 dari target sebesar 90 dengan nilai indeks sebesar 110,29%.

## 11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

### 1) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

"Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.



Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi." Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2022 adalah sebesar 95,92% dari target sebesar 95,5% dengan nilai indeks sebesar 100,44%.

2) Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2022 adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 85,00% dengan nilai indeks sebesar 117,65%.

#### b. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilakukan analisis terhadap faktor penyebab adanya keberhasilan/peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang harus dilakukan, khususnya yang terkait pencapaian kinerja pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, sebagai berikut :

**Tabel 9**

**Evaluasi Kinerja Dalam Pengelolaan Kekayaan Negara**

| No. | Kendala yang dialami                                                    | Upaya yang dilakukan                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Satker masih melaksanakan pendataan dan pengukuran objek SBSK           | 1. Melaksanakan identifikasi objek yang belum selesai dan melakukan pendampingan dengan satker yang belum menyelesaikan target SBSK. |
| 2.  | Objek berada dalam kawasan militer dan memerlukan prosedur khusus untuk |                                                                                                                                      |



|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | bisa mengakses.                                                       | 2. Melaksanakan konfirmasi dan rekonsiliasi data target SBSK dengan Satker.                                                                                                                       |
| 3. | Terdapat duplikasi objek target SBSK                                  | 3. Berkoordinasi dengan Kanwil DJKN dan Kantor Pusat DJKN terkait rencana penggantian objek target 2022 dan carry over atas objek yang teridentifikasi belum dapat diselesaikan untuk tahun 2023. |
| 4. | Nilai efektivitas edukasi dan komunikasi belum sesuai yang diharapkan | Tetap memberikan bimbingan baik melalui surat maupun tatap muka maupun media lain. Memberikan penjelasan kepada stakeholder sesuai dengan nilai - nilai Kementerian Keuangan                      |

Tabel 10

## Evaluasi Kinerja dalam Pelayanan Lelang

| No. | Permasalahan                                                                                                                   | Upaya yang dilakukan                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | masih terdapat objek lelang yang belum free and clear, sehingga calon pembeli merasa ragu untuk mengikuti pelaksanaan lelang   | Menggalakkan lelang cessie (penjualan hak tagih) pada KPKNL Jakarta V, karena sejak 2018 belum pernah melaksanakan hal ini melalui penggalan potensi dengan surat kepala kpknl |
| 2.  | Tingginya lelang dengan hasil Tidak Ada Penawaran (TAP).                                                                       | Meningkatkan koordinasi dengan pemohon lelang untuk ikut serta dalam optimalisasi terjualnya objek lelang                                                                      |
| 3.  | Adanya pemohon lelang yang belum mengetahui mengenai aplikasi lelang.go.id                                                     | mensosialisasikan aplikasi lelang.go.id, baik secara offline (konsultasi secara langsung) atau secara online (melalui media sosial)                                            |
| 4.  | Terdapat peluang adanya selisih data                                                                                           | melakukan inputing data hasil pelaksanaan lelang dengan tepat waktu                                                                                                            |
| 5.  | Adanya aplikasi baru mengenai SKPT online, sehingga seluruh pemohon masih belum memahami prosedur tentang SKPT online tersebut | meningkatkan koordinasi dengan pemohon lelang terkait dengan pengajuan SKPT online                                                                                             |



Tabel 11

## Evaluasi Kinerja Dalam Pelayanan Penilaian

| No | Kendala yang dialami                                                                   | Upaya yang dilakukan                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nilai usulan yang diajukan pemohon atau satuan kerja lebih tinggi daripada nilai wajar | Memberikan edukasi kepada satuan kerja yang dikunjungi pada saat survei penilaian |

Tabel 12

## Evaluasi Kinerja Dalam Pengurusan Piutang Negara

| No. | Kendala yang Dialami                                                                                                              | Upaya yang Dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Hasil penilaian obyek yang belum selesai, kendala internal debitur                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mem-follow up Debitur-debitur prioritas dan potensial bagi penerimaan Biad</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang untuk tata kelola piutang yang baik</li> <li>3. Menindaklanjuti upaya-upaya yang dilakukan oleh satgas BLBI sesuai ketentuan</li> </ol> |
| 2.  | BKPN tidak memiliki barang jaminan, Debitur tidak diketahui keberadaannya                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya penagihan dengan bantuan satgas BLBI</li> <li>2. Koordinasi penyelesaian dengan satgas BLBI</li> <li>3. Angsuran dari debitur/obligor</li> <li>4. Melakukan eksekusi barang jaminan dan HKL debitur/obligor</li> </ol>                                                |
| 3.  | Penanggung/penjamin utang tidak kooperatif, PH/PjH tidak diketahui keberadaannya/telah meninggal, barang jaminan bermasalah hukum |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.  | BKPN memiliki permasalahan hukum                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.  | Eksekusi lelang barang jaminan memerlukan effort persiapan yang panjang                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk capaian kinerja tahun 2022, perhitungan capaian IKU tahun 2022 yaitu persentase kualitas pelaksanaan anggaran terbagi dalam 4 (empat) komponen yang terdiri dari realisasi penyerapan anggaran, realisasi output, realisasi efisiensi dan konsistensi atas pelaksanaan rencana penarikan anggaran. Perhitungan capaian kinerja yang terbagi dalam empat komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Jakarta V**  
**Bulan Desember Tahun Anggaran 2022**

| URAIAN        | PAGU AKHIR (Rp) | REALISASI (Rp)    | % PENYERAPAN ANGGARAN |
|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
|               |                 | s.d.<br>Bulan Ini | s.d.<br>Bulan Ini     |
| (1)           | (2)             | (4)               | (6)                   |
| Pagu Anggaran | 2.355.947.000   | 2.160.991.719     | 91,72%                |

**Tabel 14**  
**Realisasi Output 2021 KPKNL Jakarta V**  
**Bulan Desember Tahun Anggaran 2022**

| NO  | KELUARAN RIIL                                                                                                 | VOLUME | Realisasi | % CAPAIAN KELUARAN RIIL |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|     |                                                                                                               |        |           | s.d.<br>Bulan Ini       |
| (1) | (2)                                                                                                           | (3)    | (4)       | (7)                     |
| 1   | Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang                                                             | 60     | 75        | 125%                    |
| 2   | Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara                                                              | 250    | 356       | 142%                    |
| 3   | Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara                                                         | 600    | 738       | 123%                    |
| 4   | Risalah Lelang                                                                                                | 610    | 776       | 127%                    |
| 5   | Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)                                                                             | 10     | 16        | 160%                    |
| 6   | Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)                                                        | 309    | 362       | 117%                    |
| 7   | Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset                                                                      | 50     | 50        | 100%                    |
| 8   | Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) | 381    | 384       | 101%                    |
| 9   | Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara                                                                         | 1      | 1         | 100%                    |
| 10  | Rekomendasi Hasil Penilaian                                                                                   | 1      | 2         | 200%                    |
| 11  | Aset BUN yang Dikelola                                                                                        | 115    | 115       | 100%                    |
| 12  | Layanan Bantuan Hukum                                                                                         | 20     | 30        | 150%                    |
| 13  | Kerumahtanggaan                                                                                               | 12     | 12        | 100%                    |
| 14  | Layanan Perkantoran                                                                                           | 12     | 12        | 100%                    |
| 15  | Kehumasa                                                                                                      | 2      | 6         | 300%                    |
| 16  | Rekomendasi Kepatuhan Internal                                                                                | 5      | 5         | 100%                    |



**Tabel 15**  
**Konsistensi Rencana Penarikan Dana**  
**KPKNL Jakarta V**  
**Bulan Desember Tahun 2021**

| BULAN     | RPD<br>(Belanja Barang<br>dan Belanja<br>Modal) | REALISASI PENYERAPAN<br>BULAN INI<br>(Belanja Barang dan Belanja<br>Modal) | RPD - REALISASI<br>(Selisih) |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| (1)       | (2)                                             | (3)                                                                        | (4)                          |
| Januari   | 29.423.253                                      | 29.423.253                                                                 | -                            |
| Februari  | 143.104.122                                     | 143.104.122                                                                | -                            |
| Maret     | 147.401.606                                     | 147.401.606                                                                | -                            |
| April     | 149.455.969                                     | 149.455.970                                                                | 1                            |
| Mei       | 350.946.435                                     | 350.946.435                                                                | -                            |
| Juni      | 348.459.731                                     | 348.459.731                                                                | -                            |
| Juli      | 125.653.572                                     | 125.653.572                                                                | -                            |
| Agustus   | 153.946.772                                     | 153.946.773                                                                | 1                            |
| September | 203.382.451                                     | 203.382.451                                                                | -                            |
| Oktober   | 120.593.999                                     | Rp164.251.230                                                              | 602.921                      |
| November  | Rp130.000.000                                   | Rp133.887.746                                                              | 5.686.973                    |
| Desember  | Rp300.415.284                                   | Rp261.008.468                                                              | 201.245.177                  |

Dari keseluruhan anggaran yang tersedia pada DIPA KPKNL Jakarta V pada tahun 2022 yang mencapai nilai Rp.2.355.947.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.2.160.991.719,00 atau 91,72%. Terhadap Kode dan Nama Kegiatan, dapat dirinci realisasi anggaran pada tabel berikut:

**Tabel 16**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2022**

| No | Uraian                                        | Pagu Dalam<br>DIPA<br>(Rp) | Realisasi Belanja<br>(Rp) | Persen<br>(%) |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. | 4796   Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | 7.609.000                  | 3.715.000                 | 48,82%        |
| 2. | 4798   Pengelolaan Aset                       | 831.088.000                | 687.429.396               | 82,71%        |
| 3. | 4700   Legislasi dan Litigasi                 | 49.177.000                 | 48.731.897                | 99,09%        |
| 4. | 4701   Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum    | 1.462.697.000              | 1.418.423.426             | 96,97%        |



|               |                                                                  |                      |                      |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 5.            | 4702   Pengelolaan komunikasi dan informasi publik               | 1.488.000            | 0                    | 0%            |
| 6.            | 4704   Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | 3.888.000            | 2.692.000            | 69,24%        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                  | <b>2.355.947.000</b> | <b>2.160.991.719</b> | <b>91,72%</b> |



## **BAB IV**

### **CAPAIAN LAIN**

#### **1. Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM)**

Pada Tahun 2021 KPKNL Jakarta V berhasil mempertahankan predikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK WBBM) yang telah diraih pada Tahun 2013. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organta), Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ketika melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KPKNL Jakarta V sebagai kantor yang sudah berpredikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, namun secara umum predikat WBK-WBBM masih layak disandang KPKNL Jakarta V.

#### **2. Sertifikasi ISO 9001:2015**

Untuk menjaga mutu layanan kepada mitra kerja, khususnya dalam pelayanan lelang, KPKNL Jakarta V telah berhasil meraih sertifikat ISO 9001:2015 pada tahun 2017 dan berhasil dipertahankan pada tahun 2021. Sertifikasi tersebut menunjukkan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan di KPKNL Jakarta V telah memenuhi standar layanan sesuai standar Badan ISO Internasional. Meskipun belum semua layanan disertifikatkan, namun sertifikasi ISO 9001:2015 untuk layanan lelang tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang lain agar dapat memenuhi standar layanan yang sama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta V tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta V tahun 2022 memuat capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/29/M.PAN/5/2010 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selain itu Laporan ini juga memuat capaian lain yang berhasil diraih oleh KPKNL Jakarta V.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja KPKNL Jakarta V ada yang berhasil melampaui target, namun ada pula yang belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. Dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang dirinci menjadi 19 (Sembilan belas) IKU yang menjadi tanggung jawab KPKNL Jakarta V, dengan semua 19 memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja  $\geq 100\%$  (indikator warna hijau).



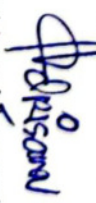
**MATRIKS EVALUASI INDIKATOR, PENETAPAN TARGET, DAN CAPAIAN KINERJA**  
TAHUN 2022  
KPKNL JAKARTA V

| Indikator Kinerja pada Rencana Strategis                                | Target Kinerja pada Rencana Strategis                                              | Indikator Kinerja pada Kontrak Kinerja | Target Kinerja pada Kontrak Kinerja                                                          | Capaian Kinerja                                                                              | Penjelasan       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (1)                                                                     | (2)                                                                                | (3)                                    | (4)                                                                                          | (5)                                                                                          | (6)              |
| Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100%                                   | -PNBP Pengelolaan BMN (Rp38.032.000.000)<br><br>-PNBP Piutang Negara (Rp10.264.745.697)      | -PNBP Pengelolaan BMN (Rp58.210.265.238)<br><br>-PNBP Piutang Negara (Rp14.474.393.952)      | Target Terpenuhi |
| Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa         | Persentase produktivitas lelang                                                    | 30%                                    | -PNBP Lelang (Rp31.200.000.000)<br>% Lelang laku keseluruhan                                 | -PNBP Lelang (Rp30.615.700.687)<br>% Lelang laku keseluruhan = 44,94%                        | Target Terpenuhi |
|                                                                         | Persentase Realisasi Pokok Lelang                                                  | 100%                                   | -Pokok Lelang Kelas I (Rp635.000.000.000)<br><br>-Pokok Lelang Pegadaian (Rp110.000.000.000) | -Pokok Lelang Kelas I (Rp694.676.679.706)<br><br>-Pokok Lelang Pegadaian (Rp143.685.021.000) | Target Terpenuhi |
|                                                                         | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara                                    | 100%                                   | Target/Realisasi Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Rp1.000.000.000.000)       | Target/Realisasi Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Rp1.354.089.711.921)       | Target Terpenuhi |
| Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi                                   | Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL                                             | 4.75                                   | Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL(4.75)                                                 | Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL(4.76)                                                 | Target Terpenuhi |
| Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal                     | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK                                      | 65%                                    | Target/Realisasi tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (65%)                         | Target/Realisasi tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (80.49%)                      | Target Terpenuhi |
|                                                                         | Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan                                   | 100%                                   | Target/realisasi bidang tanah yang telah disertifikatkan (309)                               | Target/realisasi bidang tanah yang telah disertifikatkan (363)                               | Target Terpenuhi |
|                                                                         | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)                         | 100%                                   | Target/Realisasi Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) (600)            | Target/Realisasi Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) (738)            | Target Terpenuhi |
|                                                                         | Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)                     | 100%                                   | -Target/Realisasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) 50                                  | -Target/Realisasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) 50                                  | Target Tercapai  |
|                                                                         |                                                                                    |                                        |                                                                                              |                                                                                              |                  |



|                                                              |                                                                              |       |                                                                                    |                                                                                       |                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                              |                                                                              |       | -Target/Realisasi Penyusunan dan Penyampaian Rekomendasi (349)                     | -Target/Realisasi Penyusunan dan Penyampaian Rekomendasi (349)                        |                   |
| Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional         | Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian                                          | 19%   | Target/Realisasi Deviasi ketergunaan hasil penilaian (19%)                         | Target/Realisasi Deviasi ketergunaan hasil penilaian (7,30%)                          | Target Terlampaui |
| Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif | Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction           | 92%   | Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction (92%)           | Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction (100%)             | Target Terlampaui |
|                                                              | Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN                                           | 10%   | Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN (10%)                                           | Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN (0,2%)                                             | Target Terlampaui |
| Edukasi yang Efektif                                         | Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi                                   | 93    | Target/Realisasi (91)                                                              | Target/Realisasi (93,44)                                                              | Target Terlampaui |
| Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif                     | Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara | 85%   | Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara (85%) | Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara (94,17%) | Target Terlampaui |
|                                                              | Persentase pengembangan kompetensi pegawai                                   | 100%  | Persentase pengembangan kompetensi pegawai (100%)                                  | Persentase pengembangan kompetensi pegawai (120%)                                     | Target Terlampaui |
| SDM yang kompeten                                            | Nilai review pengelolaan kinerja                                             | 80    | Target/Realisasi (80)                                                              | Target/Realisasi (98,63)                                                              | Target Terlampaui |
| Organisasi yang fit for purpose                              | Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator                     | 90    | Target/Realisasi (90)                                                              | Target/Realisasi (99,26)                                                              | Target Terlampaui |
|                                                              | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                                     | 95,5% | Target/Realisasi (95,5%)                                                           | Target/Realisasi (95,79%)                                                             | Target Terlampaui |
| Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal          | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan                            | 85%   | Target/Realisasi (85%)                                                             | Target/Realisasi (100%)                                                               | Target Terlampaui |

Jakarta, 02 Januari 2023  
Kepala Kantor.

  
Adriana Viveryanti